

PERILAKU PETANI PADI STUDI KASUS JAWA BARAT

ABSTRAK

Jawa Barat merupakan salah satu Propinsi yang potensial di Indonesia terutama dalam usahatani padi. Periode tahun 1993 sampai dengan tahun 2013, produksi padi sangat berfluktuasi dimana luas panen, produksi dan produktifitas menunjukkan trend yang menurun. Hal ini merupakan salah satu indikasi terjadinya fluktuasi produksi yang kemungkinan disebabkan oleh penggunaan lahan yang sudah berkurang atau perubahan perilaku petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku petani padi di Jawa Barat khususnya yang berwawasan lingkungan, dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Penelitian dilaksanakan di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Cianjur serta Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Subang. Untuk menganalisis perilaku petani digunakan analisis deskriptif, Analisis Thurstone dan Analisis Trend serta pengujian model dengan Regresi Logistik. Jenis varietas yang umum digunakan di Jawa Barat adalah Ciherang. Secara umum petani di Jawa Barat sudah berperilaku dan berwawasan terhadap lingkungan. Hal ini ditunjukkan dari perilaku dalam pemilihan benih, alasan pemilihan pupuk serta pestisida. Dari pemilihan benih, petani sudah memilih benih yang ramah terhadap lingkungan. Dari pemilihan pupuk, kecenderungan penggunaan pupuk organik untuk masa yang akan datang kecenderungannya semakin meningkat, sedangkan dari tren penggunaan dosis pestisida, penggunaan dosis yang lebih rendah mempunyai trend yang meningkat juga, akan tetapi ukuran dosis penggunaannya semakin menurun.

Kata kunci: Kebijakan, Lingkungan, Model Regresi Logistik, Perilaku petani padi, Thurstone.

I. PENDAHULUAN

Padi merupakan komoditas penting di Indonesia, karena merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Budijanto dan Sitanggang (2011) menyatakan bahwa beras memiliki posisi strategis yang berperan sebagai makanan pokok (*staple food*) bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2014), secara nasional produksi padi tahun 2013 sebesar 71,28 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), terjadi kenaikan sebanyak 2,22 juta ton dibandingkan produksi tahun 2012. Kenaikan produksi terjadi karena peningkatan luas panen padi di Indonesia seluas 389,73 ribu hektar dan juga peningkatan produktivitas sebesar 0,16 kuintal per hektar. Produksi padi tahun 2012 sebesar 69,06 juta ton GKG, terjadi kenaikan sebesar 3,299 juta ton dibandingkan produksi tahun 2011 sebesar 65,76 juta ton GKG (Lampiran 1).

Jawa Barat merupakan salah satu propinsi yang potensial di Indonesia dalam usahatani padi. Meskipun Jawa Barat merupakan sentra produksi padi, namun selama 21 tahun terakhir, luas panen, produktivitas dan produksi padi mengalami fluktuasi. Periode 21 tahun terakhir (1993 - 2013), luas panen, produktivitas dan produksi padi di Jawa Barat memperlihatkan pertumbuhan yang tidak stabil (BPS, 2014). (Lampiran 2)

Salah satu cara mengukur instabilitas adalah dengan melihat besaran CV (*Coefficient of Variation*), seperti pada Lampiran 1 dan 2. Pertumbuhan produksi padi di Jawa Barat sejak tahun 2003 (periode 2003-2013) semakin kurang stabil dibandingkan dengan periode 1993-2002, dengan angka CV (10.65 persen) sedangkan periode sebelumnya (1993-2002) CV (6.50 persen). Sedangkan produksi padi secara nasional pada tahun yang sama, periode 2003-2013 semakin kurang stabil dibandingkan dengan periode 1993-2002, dengan angka CV (11.22 persen) sedangkan periode sebelumnya (1993-2002) CV (3.27 persen).

Penyebab rendahnya produktivitas padi salah satunya adalah karena perilaku budidaya padi yang konvensional secara terus menerus seperti budidaya tanpa pengembalian residu tanaman, penggunaan pupuk anorganik, penggenangan secara terus menerus, penanganan bibit yang kurang benar serta penggunaan pestisida sintesis dengan tidak bijaksana. Pola budidaya tersebut berdampak pada kesehatan dan kesuburan tanah yang semakin menurun, keterbatasan air dan kendala kekeringan serta keterbatasan faktor produksi. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa terjadinya fluktuasi produksi kemungkinan disebabkan oleh penggunaan lahan yang sudah berkurang (konversi lahan) atau perubahan perilaku petani (alih fungsi lahan), sehingga diperlukan suatu usaha agar pembangunan pertanian yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

Suatu kegiatan pembangunan pertanian dinyatakan berkelanjutan, jika kegiatan tersebut secara ekonomi (profit), ekologi (planet) dan sosial (people) bersifat berkelanjutan (Srageldin, 1996 dalam Dahuri, 1998). Berkelanjutan secara ekonomi berarti suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahakan pertumbuhan ekonomi. Berkelanjutan secara ekologi mengandung arti bahwa kegiatan

tersebut harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Sementara itu berkelanjutan secara sosial, mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan. mobilitas sosial, pengembangan kelembagaan dan individu. Dengan perkataan lain, konsep pertanian berkelanjutan berorientasi pada tiga dimensi keberlanjutan, yaitu: keberlanjutan usaha ekonomi (*profit*), keberlanjutan ekologi alam (*planet*) dan keberlanjutan kehidupan sosial manusia (*people*). Dengan memperhatikan 2P saja (misalkan *profit* dan *planet*) tidaklah cukup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, oleh sebab itu pilar *people* (dalam penelitian ini adalah perilaku petani) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Selain faktor lingkungan, perilaku petani juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang ada. Banyak petani akhirnya alih fungsi lahan akibat kebijakan yang belum efektif di tingkat petani. Hal ini disebabkan antara lain pemerintah kurang meningkatkan investasi publik ke sub-sektor pangan khususnya dan sektor pertanian umumnya. Misalnya, pemerintah mengalihkan sebagian besar subsidi input (khususnya pupuk, kredit) untuk membiayai infrastruktur, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lahan, ditambah dengan dana baru, maka usaha untuk meningkatkan produksi dan menjaga keberlanjutan peningkatan produksi akan lebih berhasil, serta mencegah konversi lahan sawah subur yang beririgasi teknis, terutama di pulau Jawa. Sementara itu, pada pemerintahan ORBA berhasil mencapai swasembada beras karena peran pemerintah dalam membangun infrastruktur di sektor pertanian termasuk lembaga Riset dan penyuluhan di sub-sektor pangan (Sawit, 2012).

Meskipun Jawa Barat termasuk Sentra produksi padi, namun kenaikan produksi padi nasional, tidak serta merta diikuti kenaikan produksi di Jawa Barat. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku petani padi di Jawa Barat khususnya yang berwawasan lingkungan, dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk dapat merumuskan nantinya suatu rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan petani padi di Jawa Barat. Perilaku usahatani padi ini akan di analisis berdasarkan tiga perilaku yaitu perilaku pemilihan benih, perilaku pemilihan pupuk dan perilaku pengendalian Hama Penyakit Tanaman (HPT). Pemilihan ketiga perilaku ini berdasarkan perilaku petani yang paling dekat hubungannya dengan aspek lingkungan.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Metodologi Pengumpulan data

Penelitian dilakukan di Propinsi Jawa Barat dengan tiga Kabupaten terpilih, yaitu Kabupaten Cianjur (Kecamatan Cugenang, Ciranjang dan Karang Tengah); Kabupaten Subang (Kecamatan Ciasem, Cipeundeuy dan Cibogo) dan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Kadipaten, Singaparna dan Sukaratu). Lokasi penelitian di pilih secara *purposive* dengan pertimbangan daerah sentra produksi padi dan juga letak geografis. Daerah Subang diambil karena merupakan daerah penghasil padi di Jawa Barat bagian utara, yang letak geografisnya berada diantara Karawang dan Indramayu sebagai sentra produksi padi. Sedangkan Kabupaten Cianjur dan Tasikmalaya mewakili Jawa Barat bagian selatan. Responden di ambil secara acak (*stratified random sampling*) dengan *margin error* sekitar 6,5 persen dari jumlah populasi rumah tangga petani padi di Jawa Barat yaitu 2.321.878 KK. Dengan menggunakan rumus Slovin, total responden berjumlah 246 responden. Responden pada masing-masing kabupaten di bagi atas dua kategori yaitu kategori 1, petani yang konsisten bertanam padi yaitu sebanyak 72 orang responden dan kategori 2, petani yang berganti-ganti komoditas padi sebanyak 174 orang responden. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (i) Pengumpulan data dengan metode survei melalui daftar kuesioner; dan (ii) wawancara mendalam (*in-depth interview*).

2.2. Metode Analisis

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data di analisis secara kualitatif dan kuantitatif dan di olah dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis Thurstone, analisis Trend dan model Regresi Logistik.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum perilaku petani padi di Jawa Barat serta deskripsi awal untuk analisis berikutnya. Analisis Thurstone digunakan untuk menilai peringkat suatu atribut dan mengukur seberapa besar perbedaan kepentingan suatu atribut terhadap atribut lainnya. Dengan analisis Thurstone akan mendapatkan skala yang menggambarkan perbedaan tingkat kepentingannya. Selain itu prinsip dasar dan kelebihan metoda Thurstone ini adalah dapat mentransformasi data dari skala ordinal menjadi interval agar relevan dalam melakukan interpretasi.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis Thurstone adalah sebagai berikut: (i) Melakukan analisis deskriptif untuk melihat profil responden; dan (ii) Menganalisis data menggunakan metode Thurstone (Thurstone, 1927). Metode Thurstone pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog bernama Louise Leon Thurstone. L. L, dengan persamaan sebagai berikut:

$$S_i - S_j = x_{ij} \sqrt{\sigma_i^2 + \sigma_j^2 - 2r\sigma_i\sigma_j} \dots \dots \dots (1)$$

- S_i : nilai skala psikologis dari atribut i
- S_j : nilai skala psikologis dari atribut j
- x_{ij} : nilai dari tabel normal baku yang sesuai dengan proporsi penilaian $p_{i>j}$
 Jika $p_{i>j}$ lebih dari 0.5, maka x_{ij} bernilai positif,
 Jika $p_{i>j}$ kurang dari 0.5, maka x_{ij} bernilai negatif
- σ_i : dispersi diskriminal dari atribut i
- σ_j : dispersi diskriminal dari atribut j
- r : korelasi antara simpangan diskriminal dari atribut i dan atribut j pada penilaian yang sama

Tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, mengelompokkan data berdasarkan jenis kelamin dan kondisi sosial ekonomi responden.

Kedua, menghitung matriks frekuensi (F_{ij}), yaitu dengan menjumlahkan skor seluruh pengamatan perbandingan dengan aturan sebagai berikut:

$$F_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{jika atribut } i > \text{atribut } j \\ 0, & \text{jika atribut } i < \text{atribut } j \\ 0.5, & \text{jika atribut } i = \text{atribut } j \end{cases}$$

Ketiga, menghitung matriks proporsi (P_{ij}), yaitu dengan membagi setiap unsur matriks frekuensi dengan jumlah responden.

$$P_{ij} = \frac{F_{ij}}{N}$$

Keempat, mentransformasi setiap unsur matriks proporsi menjadi nilai normal baku (Z_{ij}).

Kelima, mengurutkan kolom matriks Z dari kolom dengan rata-rata terkecil hingga terbesar.

Keenam, menghitung selisih rata-rata antar kolom terdekat.

Ketujuh, menghitung nilai skala tiap atribut, yaitu dengan nilai skala awal nol dan nilai skala berikutnya merupakan kumulatif dari nilai skala sebelumnya.

Kurt Lewin (1951) dalam Azwar (2000) merumuskan suatu model hubungan perilaku yang mengatakan bahwa perilaku (B) adalah fungsi karakteristik individu (P) dan lingkungan (E), yang dinotasikan menjadi $B = f(P, E)$. Karakteristik individu meliputi berbagai faktor seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku si petani tersebut.

Selanjutnya, untuk melihat kecenderungan ke depan (sustainability) dari perilaku petani padi khususnya mengenai perilaku pemupukan dan perilaku pengendalian hama penyakit tanaman akan digunakan analisis trend seperti fungsi linear di bawah ini (Bandura, 1977). Dengan menggunakan fungsi linear dapat dilihat kecenderungan penggunaan pupuk organik/anorganik serta penggunaan pestisida beberapa tahun ke depan.

Fungsi linear untuk dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2):

$$\frac{y_2 - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x_2 - x_1}{x_2 - x_1} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- x_1 : nilai amatan pertama pada sumbu x (tahun)
- y_1 : nilai amatan pertama pada sumbu y (nilai dosis)
- x_2 : nilai amatan kedua pada sumbu x (tahun)

y_2 : nilai amatan kedua pada sumbu y (nilai dosis)

Sedangkan untuk menguji faktor yang berpengaruh terhadap perilaku petani padi dan kebijakan digunakan model Regresi Logistik terutama untuk melihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam perilaku pemilihan benih, perilaku pemilihan pupuk, perilaku pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman dan kebijakan yang sudah berjalan. Model regresi logistik dapat dilihat seperti di bawah ini (Beins, 2012):

Persamaan model regresi logistik multinomial dapat dituliskan sebagai berikut:

$$g_j(x) = \beta_{j0} + \beta_{j1}x_1 + \beta_{j2}x_2 + \dots + \beta_{jp}x_p \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

$g_j(x)$: variabel dependen yang berupa variabel kategori politomus dengan skala pengukuran nominal,

x_p : variabel independen,

β_{jp} : parameter.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil (Keragaan) Usahatani Padi

Profil (Keragaan) usahatani padi diteliti untuk menggambarkan alasan petani memilih usahatani padi dan mengetahui apakah petani mendapatkan bantuan/kredit untuk melakukan usahatani padi. Analisis profil (keragaan) usahatani padi dilakukan dengan mengidentifikasi aspek harga, pemasaran, kredit, tradisi/turunan, perawatan lahan, iklim dan pengetahuan/keterampilan yang sudah dikuasai, serta sumber/asal kredit.

Tabel 1 mendeskripsikan alasan petani memilih usahatani padi. Mayoritas petani baik kategori 1 maupun kategori 2 memilih faktor harga yang baik sebagai alasan memilih usahatani padi dengan angka rata-rata sebesar 46 persen. Faktor turunan/tradisi mendapat rata-rata sebesar 19 persen dan faktor adanya kredit sebesar 10 persen, sedangkan sisanya sebesar 25 persen karena faktor pemasarannya sudah terjamin, perawatannya mudah, lahannya cocok dan iklimnya cocok, serta pengetahuan/keterampilan yang sudah dikuasai.

Tabel 1. Alasan Petani Memilih Usahatani Padi

No.	Alasan	Kategori 1		Kategori 2		Total	
		N	%	n	%	N	%
1	Harganya baik	42	58	72	41	114	46
2	Pemasarannya sudah terjamin	5	7	13	7	18	7
3	Adanya Kredit	4	6	20	11	24	10
4	Turunan/tradisi	14	19	33	19	47	19
5	Perawatannya mudah	2	3	14	8	16	7
6	Lahannya cocok	2	3	5	3	7	3
7	Iklimnya cocok	2	3	1	1	3	1
8	Pengetahuan/keterampilan yang sudah dikuasai	1	1	16	9	17	7
Total		72	100	174	100	246	100

Berdasarkan analisis Thurstone, alasan (atribut) yang dianggap paling penting oleh petani baik kategori 1 maupun kategori 2 dalam memilih usahatani padi adalah faktor harga yang baik. Faktor turunan/tradisi merupakan atribut terbesar kedua. Atribut lainnya yaitu adanya kredit, faktor pemasarannya sudah terjamin, perawatannya mudah, lahannya dan iklimnya cocok, serta pengetahuan/keterampilan yang sudah dikuasai merupakan atribut yang tidak terlalu dianggap penting oleh petani. Selain faktor turunan/tradisi, alasan/motivasi utama petani memilih usahatani padi adalah karena faktor harga. Hal ini memberikan implikasi bahwa peran pemerintah dalam menetapkan harga

gabah/beras sangat penting untuk menjaga harga pembelian pemerintah yang cukup merangsang petani untuk memproduksi padi.

Tabel 2 mendeskripsikan sumber pendanaan petani. Mayoritas petani atau sebesar 87.8 persen tidak mendapatkan bantuan kredit dalam melakukan usahatani padi. Hanya sekitar 12.2 persen petani yang mendapatkan bantuan kredit. Bantuan kredit dari petani berasal dari lembaga Keuangan rata-rata sebesar 2 persen, dari perseorangan rata-rata sebesar 4.5 persen dan rata-rata sebesar 5.7 persen berasal dari lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar petani responden belum merasakan manfaat dari kredit atau bantuan dari lembaga keuangan.

Tabel 2. Sumber Kredit/Bantuan Yang Pernah Diterima

No.	Sumber	Kategori I		Kategori II		Total	
		N	%	n	%	N	%
1	Lembaga Keuangan	1	1	4	2	5	2,0
2	Perorangan	3	4	8	5	11	4,5
3	Tidak Menerima Kredit	67	93	149	86	216	87,8
4	Lainnya	1	1	13	7	14	5,7
Total		72	100	174	100	246	100

*Lainnya : Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Kredit Usahatani (KUT)

Sebagian besar petani responden belum merasakan manfaat dari kredit atau bantuan dari lembaga keuangan. Padahal bagi petani, kredit merupakan salah satu sarana untuk melangsungkan kegiatan produksi di saat kebutuhan modal usahatani tidak dapat dipenuhi sendiri oleh rumah tangga petani dan kredit juga diperlukan untuk keperluan konsumsi di saat penghasilan yang diharapkan belum atau tidak didapatkan. Jadi, permasalahan kredit tidak hanya berkaitan dengan karakteristik rumah tangga sebagai unit produksi, tetapi berkaitan juga dengan karakteristik rumah tangga sebagai unit konsumsi (konsumen). Oleh sebab itu, mempelajari pengaruh kredit dilihat dari sisi rumah tangga secara utuh yang menggabungkan secara simultan sisi produksi dan sisi konsumsi adalah sangat penting. Pemikiran ini berlandaskan kepada karakteristik rumah tangga petani sebagai unit ekonomi yaitu sebagai unit produksi sekaligus unit konsumsi (Rosmiati, 2012), sehingga kredit memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan rumahtangga petani, bagi rumah tangga petani baik merupakan sumber pembiayaan untuk memenuhi kekurangan modal usahatani maupun untuk kebutuhan konsumsi di saat penghasilan yang diharapkan belum atau tidak didapatkan.

3.2. Aspek Teknis Usahatani Padi.

Aspek teknis yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai sumber informasi penyuluhan pertanian, penentuan jarak lahan dan penggunaan benih.

3.2.1. Sumber Informasi

Berdasarkan data yang diberikan responden diperoleh sebesar 56 persen petani menyatakan bahwa informasi pengetahuan budidaya padi didapatkan dari penyuluh pertanian. Sumber informasi pengetahuan budidaya padi lainnya berasal dari relasi sebesar 46 persen dengan rincian 12 persen dari saudara, 17 persen dari teman dan 14 persen dari orang tua. Sedangkan sisanya sebesar 2 persen sumber informasi dari lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran penyuluh sudah cukup baik di wilayah sampel, hal ini dibuktikan dengan sumber informasi pengetahuan budidaya padi 56 persen berasal dari Penyuluh Pertanian (Tabel 3).

Tabel 3. Sumber Informasi Pengetahuan Budidaya Padi

No.	Sumber	Kategori I	Kategori II	Total
		%	%	%
1	Saudara	13	11	12
2	Teman	14	18	17
3	Orang Tua	21	10	14
4	Penyuluh Pertanian	52	57	56
5	Lainnya*	0	3	2

Total	100	100	100
-------	-----	-----	-----

*Lainnya : Mass Media

Berdasarkan cara mendapatkan benih, Tabel 4 memperlihatkan bahwa 44 persen petani mendapatkan benih dari Kelompok tani, 42 persen petani mendapatkan benih dari pasar, sedangkan sumber benih lainnya adalah 14 persen dari kios pertanian dan 1 persen dari teman. Hal ini menunjukkan bahwa peran kelompok tani dalam penyebaran benih padi di wilayah sampel sangat baik. Para petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani lebih cepat mendapatkan benih padi dibandingkan dengan petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani, karena sifatnya pengelompokkan, maka dalam pendistribusian benih padi menjadi lebih efektif.

Tabel 4. Sumber Benih Padi

No.	Sumber	Kategori I		Kategori II		Total	
		%		%		%	
1	Pasar	14		49		42	
2	Koperasi	0		0		0	
3	Teman	0		1		1	
4	Kelompok Tani	54		41		44	
5	Lainnya	33		9		14	
Total		100		100		100	

*Lainnya : Kios Pertanian

3.2.2. Jarak Tanam

Dalam upaya pencapaian target program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Badan Pengembangan dan Penelitian telah banyak mengeluarkan rekomendasi untuk diaplikasikan oleh petani. Salah satu rekomendasi ini adalah penerapan sistem tanam yang benar dan baik melalui pengaturan jarak tanam yang di kenal dengan sistem tanam jajar legowo. Menurut Sembiring (2001), sistem tanam legowo merupakan salah satu sistem tanam padi sawah yang apabila dibandingkan dengan sistem tanam lainnya memiliki keuntungan diantaranya adalah dapat meningkatkan aktivitas fotosintesis yang berdampak pada peningkatan produktivitas tanaman. 66 persen petani diwilayah penelitian menjawab bahwa jarak tanam padi yang digunakan adalah 27 cm x 27 cm. Jarak tanam 25 cm x 25 cm dipilih oleh petani di wilayah penelitian sebesar 31 persen, sedangkan sisanya sebanyak 2 persen petani memilih jarak tanam 22 cm x 22 cm serta 1 persen petani memilih jarak tanam 20cm x20 cm (Tabel 5).

Tabel 5. Informasi Jarak Tanam yang Digunakan

No.	Sumber	Kategori I		Kategori II		Total	
		n	%	n	%	N	%
1	27 cm x 27 cm	54	75	108	62	162	66
2	25 cm x 25 cm	18	25	57	33	75	31
3	22 cm x 22 cm	0	0	7	4	7	2
4	20 cm x20 cm	0	0	2	1	2	1
Total		72	100	174	100	246	100.0

Sebagian besar petani di wilayah penelitian menggunakan jarak tanam padi ukuran 27 cm x 27 cm dan 25 cm x 25 cm. Petani menyatakan bahwa, semakin besar jarak tanam yang digunakan semakin besar produksi yang dihasilkan. Jarak tanam tersebut biasa dipergunakan pada saat musim hujan dengan rata-rata produksi sekitar 6 - 7 ton per ha.

3.2.3. Penggunaan Benih

Secara umum pembagian benih padi unggul di Indonesia ada 4 macam yaitu: benih penjenis (label putih), benih dasar (label kuning), benih pokok (label ungu) dan benih sebar (label biru). Pada wilayah penelitian, klasifikasi benih yang digunakan adalah benih sebar (label biru).

Berdasarkan data responden, diperoleh bahwa 46 persen petani menggunakan jumlah benih dengan ukuran 20 - 25 kg/ha dan 41 persen petani menggunakan jumlah benih ukuran 25 - 30 kg/ha. Sedangkan sisanya sebesar 12 persen petani menggunakan jumlah benih dengan ukuran 30 - 35 kg/ha dan hanya 1 persen petani yang menggunakan jumlah benih ukuran 35 - 40 kg/ha seperti yang terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Benih yang digunakan per Ha

No.	Ukuran benih	Kategori I		Kategori II		Total	
		n	%	n	%	N	%
1	20 - 25 kg/ha	38	53	75	43	113	46
2	25 - 30 kg/ha	19	26	81	47	100	41
3	30 - 35 kg/ha	13	18	18	10	31	12
4	35 - 40 kg/ha	2	3	0	0	2	1
Total		72	100	174	100	246	100.0

Menurut anjuran dari pemerintah, kebutuhan benih 25 kg per hektar. Tetapi di wilayah sampel, kenyataan yang terjadi dalam penggunaan benih adalah > 25 kg per ha. Informasi yang di dapat dari wilayah sampel bahwa penggunaan benih yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah ditujukan untuk mengantisipasi hama keong mas. Sehingga dalam satu tancep bisa di tanam 4 - 5 bibit (rumpun).

3.3. Perilaku Petani Padi

Perilaku ekonomi rumah tangga petani pada dasarnya merupakan perilaku rasional di dalam mengalokasikan sumberdaya rumah tangga untuk menghasilkan barang dan jasa, serta di dalam menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perilaku rasional rumah tangga di dalam mengalokasikan sumberdaya dapat dikelompokkan menjadi keputusan produksi, sedangkan perilaku rasional di dalam menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi keputusan konsumsi (Kusnadi, 2005). Perilaku petani adalah proses dan aktifitas ketika seorang petani berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku petani merupakan hal-hal yang mendasari petani untuk membuat keputusan penanaman (Mar'at, 1984).

Perilaku petani umumnya meliputi perilaku pengolahan, perilaku pembibitan, perilaku pemupukan, perilaku pengairan, perilaku penyiangan, perilaku pengendalian hama dan penyakit serta perilaku penyuluhan pertanian. Perilaku petani yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perilaku petani yang paling dekat hubungannya dengan aspek lingkungan yaitu perilaku pemilihan benih, perilaku pemupukan, dan perilaku pengendalian hama penyakit dan tanaman.

3.3.1. Perilaku Pemilihan Benih

Jenis varietas benih yang umum digunakan petani berdasarkan kabupaten untuk kedua kategori petani baik petani yang konsisten bertanam padi maupun petani yang berganti-ganti komoditas padi adalah Ciherang (92 persen), IR 64 (5 persen) dan Situ Bagendit (3 persen) (Tabel 7).

Tabel 7. Jenis Varietas yang Umum digunakan Berdasarkan Kabupaten

No.	Varietas	Cianjur		Subang		Tasikmalaya		Total	
		n	%	N	%	N	%	N	%
1	Ciherang	85	96,6	95	99,0	46	74.2	226	92
2	IR 64	3	3,4	1	1,0	7	11.3	11	5
3	Situ Bagendit	0	0,0	0	0,0	9	14.5	9	3
Total		88	100.0	96	100.0	62	100.0	246	100

Alasan petani memilih varietas Ciherang adalah karena varietas ini produksinya tinggi, rasa nasinya yang pulen dan disukai konsumen serta mempunyai kelebihan tahan terhadap hama dan penyakit terutama hama wereng coklat biotipe 2 dan 3 serta penyakit hawar daun bakteri strain III dan IV (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2012).

Tabel 8 juga dapat menjelaskan dengan lengkap bahwa prioritas 1 sebagai pengganti varietas Ciherang adalah varietas IR 64, sedangkan IR 64 hanya bisa digantikan oleh varietas Ciherang dan Situ Bagendit. Kemudian varietas Situ Bagendit hanya bisa digantikan oleh varietas Ciherang. Prioritas 2 memberikan gambaran bahwa varietas Ciherang hanya bisa digantikan oleh IR 64, kemudian varietas IR 64 digantikan oleh Cigeulis dan seterusnya. Hal ini mengindikasikan bahwa, butuh peran serta pemerintah terutama dalam penyediaan benih di pasar.

Tabel 8. Pilihan Varietas Berdasarkan Prioritas

Prioritas 1			Prioritas 2			Prioritas 3		
Varietas	N	%	Varietas	N	%	Varietas	N	%
Ciherang	226	91,87	IR 64	197	87,17	Cigeulis	134	68,02
						Way Apo Baru	7	3,55
						Inpari 1	16	8,12
						Punggur	1	0,51
						Situ Bagendit	37	18,78
						Margasari	2	1,02
			Cigeulis	8	3,54	IR 64	8	100,00
			Way Apo Baru	3	1,33	IR 64	1	33,33
						Cigeulis	1	33,33
						Inpari 1	1	33,33
			Inpari 1	2	0,88	IR 64	1	50,00
						Situ Bagendit	1	50,00
			Situ Bagendit	15	6,64	IR 64	14	93,33
						Inpari 1	1	6,67
			Margasari	1	0,44	IR 64	1	100,00
IR 64	11	4,47	Ciherang	9	81,82	Cigeulis	3	33,33
						Situ Bagendit	5	55,56
						Margasari	1	11,11
			Situ Bagendit	2	18,18	Ciherang	2	100,00
Situ Bagendit	9	3,66	Ciherang	9	100,00	IR 64	9	100,00

Informasi mengenai harga benih yang digunakan pada wilayah sampel adalah berkisar antara Rp. 20.000,- s/d Rp. 50.000,- per kantong (5 kg). Dapat ditambahkan di sini, harga per kg nya berkisar antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 15.000,- Hal ini dijawab oleh 79 persen dari petani sampel (Tabel 9).

Tabel 9. Informasi Harga Benih yang digunakan

No.	Harga	Kategori I		Kategori II		Total	
		n	%	n	%	N	%
1	20 - 30 ribu	31	43	48	28	79	32
2	31 - 40 ribu	3	4	28	16	31	13
3	41 - 50 ribu	37	51	79	45	116	47
4	51 - 60 ribu	1	1	19	11	20	8
Total		72	100	174	100	246	100

Tingkat kepentingan pemilihan benih diperlukan untuk model regresi logistik. 98 persen responden menjawab bahwa pemilihan benih merupakan hal yang sangat menentukan dalam keputusan berusahatani, sedangkan 2 persen responden menjawab bahwa pemilihan benih merupakan hal yang cukup menentukan (Tabel 10).

Tabel 10. Tingkat Kepentingan Pemilihan Benih sebagai Faktor Penentu Keputusan Berusahatani

No.	Kriteria	Kategori I		Kategori II		Total	
		N	%	n	%	N	%
1	Cukup Menentukan	2	3	2	1	4	2
2	Sangat Menentukan	70	97	172	99	242	98
Total		72	100	174	100	246	100

3.3.2. Perilaku Pemupukan

Faktor penentu dalam pemilihan pupuk menurut petani kategori 1 adalah jenis lahan (33 persen), dosis yang digunakan dan harga beli yang murah (21 persen). Sedangkan petani kategori 2 menjawab faktor yang menentukan dalam pemilihan pupuk adalah dosis yang digunakan (40 persen), produksi/produktivitas (24 persen) serta jenis lahan (18 persen) (Tabel 11). Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku petani kategori 2 lebih kepada peningkatan produksi yang sebesar-besarnya, karena faktor penentu berikutnya yang mempunyai persentase kedua terbesar adalah dosis yang digunakan.

Tabel 11. Faktor Penentu dalam Pemilihan Pupuk

No	Atribut	Kategori				Total	
		1		2		N	%
		n	%	N	%		
1	Jenis Lahan	24	33	32	18	56	23
2	Dosis yang digunakan	15	21	69	40	84	34
3	Ramah lingkungan	8	11	11	6	19	8
4	Harga Beli Murah	15	21	21	12	36	15
5	Produksi/Produktivitas	10	14	41	24	51	21
Total		72	100	174	100	246	100

Dengan analisis Thurstone, dapat dijelaskan bahwa secara umum di Jawa Barat faktor yang menjadi penentu dalam pemilihan pupuk dengan prioritas tertinggi adalah dosis yang digunakan. Sedangkan berdasarkan kategori petani, kategori 1 lebih menganggap penting jenis lahan sebagai faktor penentu dalam pemilihan pupuk.

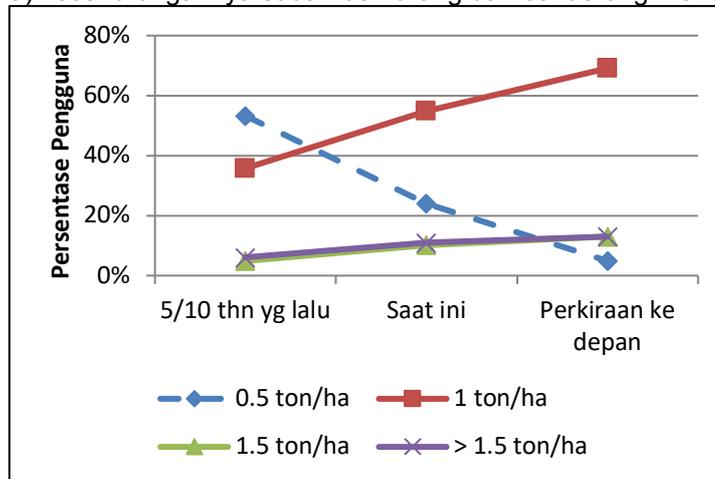
Menurut Mukhtar dan Kaharuddin (2012) jenis lahan garapan berpengaruh terhadap pemilihan pemupukan berimbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61,5 persen petani yang menerapkan teknologi pemupukan berimbang, sedangkan 64,3 persen tidak menerapkan teknologi pemupukan berimbang.

Menurut Nuhing (2003), jenis lahan berpengaruh terhadap penerapan teknologi dan akan menjadi kendala dalam pembangunan pertanian. Rendahnya pendapatan petani menyebabkan rendahnya penggunaan pupuk, dan justru meningkatkan biaya pestisida, karena ketakutan mereka akan terjadinya gagal panen. Kondisi ini nampak jelas pada usahatani padi yang dilakukan di Subak Meliling. Menurut Sinukaban (1997), permasalahan ini bisa berdampak serius karena dapat terus menerus saling memiskinkan kalau faktor-faktor penyebabnya tidak di atasi. Pemilihan skala prioritas mana yang harus ditanggulangi lebih dahulu apakah kemiskinan atau kerusakan lingkungan merupakan pilihan yang sulit. Pilihan yang sulit ini menyebabkan pemutusan siklus yang saling memiskinkan ini haruslah dilakukan secara bersamaan antara pengendalian kerusakan lingkungan dan pengentasan kemiskinan (Sinukaban dan Sihite, 1993).

Terkait bahasan mengenai kerusakan lingkungan, selanjutnya perlu dilakukan analisis tren penggunaan pupuk organik dan anorganik sebagai dasar untuk melihat keberlanjutan sistem pertanian

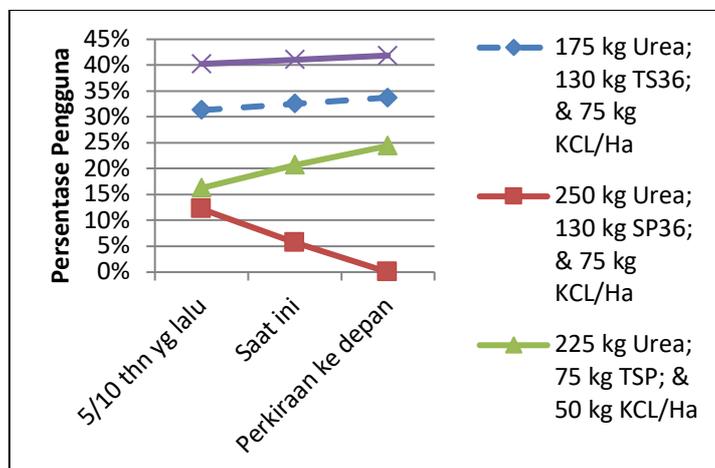
di masa yang akan datang. Hal ini berguna untuk menekan dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan di masa yang akan datang dengan seminimal mungkin.

Gambar 1 memperlihatkan analisis trend penggunaan pupuk organik. Secara umum dosis pupuk organik yang digunakan petani sampel mengindikasikan bahwa penggunaan pupuk organik yang meningkat untuk masa beberapa tahun ke depan adalah dosis 1 ton/ha, sedangkan untuk dosis yang lebih besar (>1 ton/ha) kecenderungannya sudah berkurang dan cenderung mendekati nol.



Gambar 1. Analisis Trend Penggunaan Pupuk Organik

Begitu juga dengan penggunaan pupuk anorganik, analisis trend menunjukkan bahwa penggunaan dosis yang lebih rendah kecenderungannya tidak terlalu signifikan untuk beberapa tahun ke depan. Sedangkan penggunaan dosis yang lebih besar mempunyai trend yang menurun bahkan mendekati nol (Gambar 2). Dapat diambil kesimpulan bahwa kecenderungan petani ke depan akan lebih banyak menggunakan pupuk organik dari pada penggunaan pupuk anorganik. Menurut BPPT (2011), dengan penggunaan pupuk organik pada lahan sawah akan berdampak terhadap penurunan gas rumah kaca (GRK).



Gambar 2. Analisis Trend Penggunaan Pupuk Anorganik

3.3.3. Perilaku Pengendalian Hama Penyakit dan Tanaman

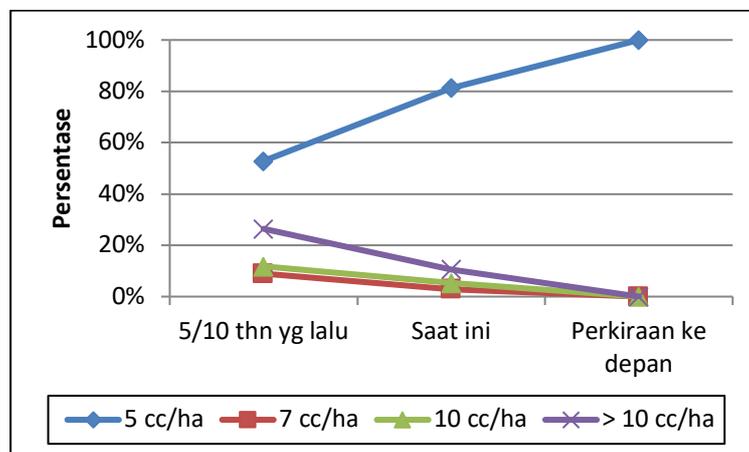
Pengendalian hama dan penyakit tanaman merupakan pendekatan pengendalian yang memperhitungkan faktor ekologi sehingga pengendalian dilakukan agar tidak mengganggu keseimbangan alami dan tidak menimbulkan kerugian besar. Pengendalian hama penyakit tanaman merupakan panduan berbagai cara pengendalian hama dan penyakit, diantaranya dengan melakukan monitoring populasi hama dan kerusakan tanaman sehingga penggunaan teknologi pengendalian dapat lebih tepat. Secara umum, alasan yang paling dianggap penting oleh petani dalam pemilihan pestisida adalah karena tingkat populasi hama (46 persen) dan jenis penyakit (36 persen) seperti terlihat pada Tabel 15.

Tabel 12. Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Pestisida

No	Atribut	Kategori				Total	
		1		2		N	%
		n	%	n	%		
1	Tingkat Populasi Hama	26	36	88	51	114	46
2	Jenis Penyakit	25	35	64	37	89	36
3	Lingkungan	15	21	6	3	21	9
4	Harga Beli Murah	2	3	6	3	8	3
5	Produksi/produktivitas tinggi	4	6	10	6	14	6
Total		72	100	174	100	246	100

Dengan analisis Thurstone, dapat terlihat bahwa peringkat tertinggi dari atribut pemilihan pestisida adalah kedua atribut tersebut, yaitu tingkat populasi hama dan jenis penyakit. Petani sampel menganggap bahwa kedua atribut ini dianggap lebih penting dari atribut lainnya.

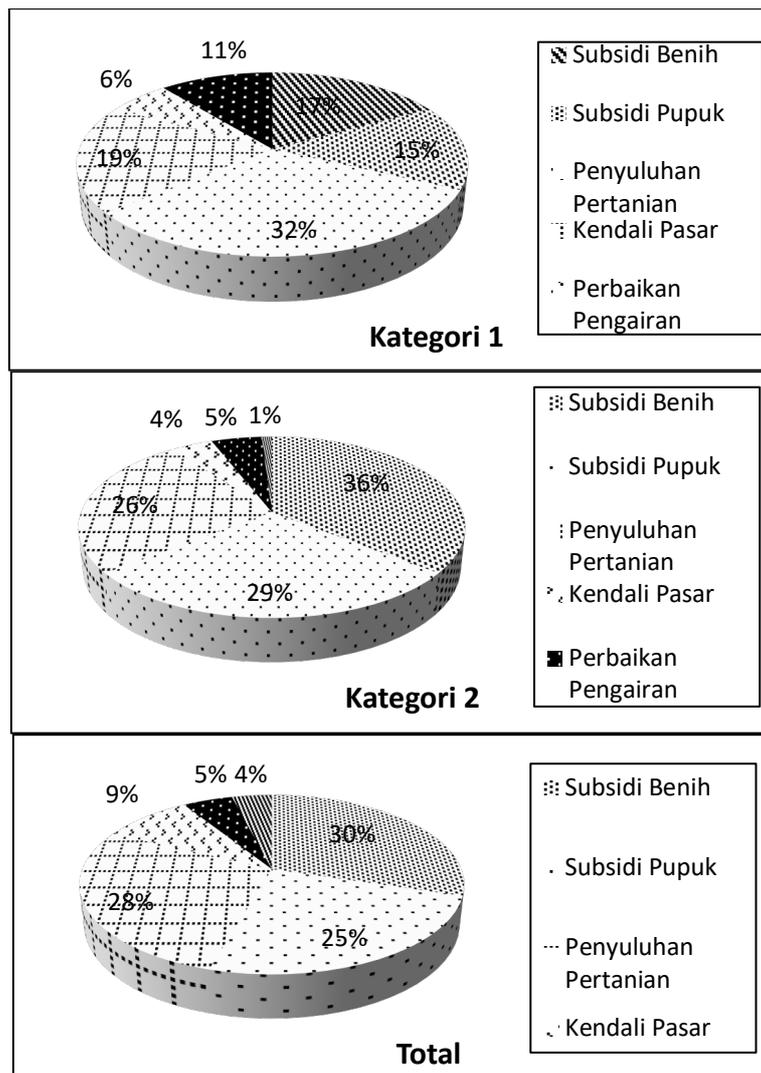
Menurut Andre (2004), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis perilaku petani padi dalam proses keputusan pembelian pestisida di daerah karawang, Jawa Barat, menyimpulkan bahwa pertimbangan awal petani padi membeli pestisida adalah kualitas (85 persen), harga (40 persen) dan merk (20 persen). Pada saat proses pembelian, alasan petani padi menggunakan merek yang dipakai karena kualitasnya memuaskan (87 persen), harga terjangkau (49 persen), dan kemudahan diperoleh (30 persen). Di lihat dari trend (kecenderungan) penggunaan pestisida (Gambar 3), kecenderungan penggunaan dosis pestisida pada wilayah sampel menunjukkan dosis yang lebih rendah mempunyai trend yang meningkat, sedangkan kecenderungan untuk dosis yang lebih besar penggunaannya semakin menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa petani di Jawa Barat sudah mulai mempunyai pemikiran yang baik terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan dosis pestisida, oleh sebab itu perlu kiranya pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan untuk terus mengusahakan penyuluhan-penyuluhan terkait kerugian ataupun dampak yang disebabkan oleh penggunaan dosis pestisida yang berlebihan dan tidak sesuai dengan dosis seharusnya.



Gambar 3. Analisis Trend Penentu Pemilihan Pestisida

3.4. Prioritas Kebijakan

Kebijakan prioritas yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan subsidi pupuk, kebijakan subsidi benih dan kebijakan penyuluh pertanian. Prioritas kebijakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum petani di wilayah penelitian belum merasa puas terhadap kebijakan yang sudah berjalan, secara persentase berturut-turut petani sampel menjawab subsidi benih (30 persen), penyuluhan pertanian (28 persen), dan subsidi pupuk (25 persen) (Gambar 9). Salah satu contoh ketidakpuasan petani terhadap kebijakan subsidi adalah subsidi benih. Informasi dari petani sampel menyatakan bahwa datangnya benih selalu terlambat (*expired*) di wilayah sampel, sehingga seringkali terjadi masa tanam padi sudah lewat. Disamping itu, benih yang datang seringkali kualitasnya tidak bagus, ditandai dengan banyak benih yang mengapung pada saat di rendam.



Gambar 9. Prioritas Kebijakan Usahatani Padi

3.4.1. Kebijakan Subsidi Benih

Pada 2014 Pemerintah menunjuk dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Shang Hyang Sri (SHS) dan PT Pertani (Persero) untuk mendistribusikan subsidi benih. Pelaksanaan mekanisme pemberian subsidi benih tahun 2014 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu menggunakan pola tertutup. Benih bersubsidi tidak dijual di pasar bebas (kios), tetapi disalurkan ke kelompok tani yang telah menggusulkan akan membeli benih. Pada tahun 2013, harga benih bersubsidi yang berlaku di tingkat kelompok tani sebagai berikut, padi inbrida Rp.8.097 /kg, subsidi benih sebesar Rp. 6.073/kg dan HET Rp.2.024/kg, (Departemen Pertanian). Kekuatan distribusi subsidi pola tertutup adalah ketepatan subsidi mencapai sasaran relatif lebih tinggi, sedangkan kelemahannya adalah keberadaan kelompok tani dan PPL adalah mutlak serta kewajiban bagi pengecer resmi untuk menyalurkan /menjual benih bersubsidi kepada petani dalam kurun waktu tertentu (Syafa'at, 2007).

Tabel 13 memperlihatkan faktor yang mempengaruhi kebijakan untuk subsidi benih yaitu kategori petani, kecocokan iklim, prospek usahatani, dan harga benih yang murah. Kategori petani, petani dengan kategori 1 cenderung tidak mengharapkan subsidi benih dibandingkan dengan petani kategori 2. Kecocokan iklim, petani dengan iklim yang mendukung untuk bertanam padi cenderung tidak mengharapkan adanya kebijakan subsidi benih dibandingkan dengan petani yang bertanam pada daerah dengan iklim yang tidak cocok.

Prospek usahatani, usahatani yang berprospek 5 tahun atau lebih cenderung membuat para petani mengharapkan adanya kebijakan subsidi benih dibandingkan dengan usahatani yang tidak

berprospek jangka panjang. Harga beli benih murah, adanya harga beli benih yang murah cenderung membuat petani untuk mengharapkan adanya subsidi benih dibandingkan jika harga benih mahal.

Tabel 13. Model Regresi Logistik Faktor-faktor yang Memengaruhi Kebijakan Subsidi Benih

No. Peubah Penjelas	Predictor (Peubah Penjelas)	Coef	SE Coef	Nilai Z	Peluang (P)	Odds Ratio
	Constant (Faktor koreksi)	-194,272	130,325	-1,49	0,136	
x1	Jabatan	-0,266949	0,312609	-0,85	0,393	0,77
x2	Keanggotaan	177,331	124,289	1,43	0,154	5,89
x3	Kredit	0,265632	0,444029	0,60	0,550	1,30
x4	Kategori	-143,429	0,341278	-4,20	0,000	0,24
x5	Luas Lahan	0,0018115	0,0743357	0,02	0,981	1,00
x6	Lahannya cocok	-0,622265	0,405457	-1,53	0,125	0,54
x7	Iklimnya cocok	-105,635	0,603803	-1,75	0,080	0,35
x8	Prospek	128,733	0,417070	3,09	0,002	3,62
x9	Ketersediaan	0,182022	0,323342	0,56	0,573	1,20
x10	Harga benih	0,927721	0,390335	2,38	0,017	2,53

Note:

1. Model dalam penelitian ini bukan berarti model linier, tetapi adalah prototype dari kondisi nyata dan merupakan bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah entitas.
2. Peubah penjelas tidak sama antara Tabel yang satu dengan yang lainnya karena bukan persamaan linier.

3.4.2. Kebijakan Subsidi Pupuk

Konsep dasar pemberian subsidi pupuk untuk petani telah digagas sejak 1970-an. Berdasarkan sistem subsidi dan sumber pembiayaan, PATTIRO (2011) menggolongkan sejarah kebijakan subsidi pupuk dalam 4 periode, yaitu:

1. Periode 1970-1993: Sistem subsidi yang diberlakukan adalah subsidi harga. Sumber pembiayaan berasal dari APBN. Pada periode ini ditetapkan dua jenis pupuk yang disubsidi, yakni: (i) 1970- 1973, pupuk yang disubsidi adalah bantuan dari PLN dan pupuk impor sebagai subsidi; (ii) 1973-1998, pupuk yang disubsidi adalah harga pupuk yang berasal dari impor dan produksi dalam negeri.
2. Periode 1999-2001: Sejak 1998, subsidi harga pupuk dicabut karena dipicu oleh terjadinya krisis ekonomi pada saat itu. Sistem subsidi pada kurun ini adalah subsidi harga bahan baku untuk pembuatan pupuk, yakni subsidi gas. Sistem subsidi dilakukan dengan memberikan insentif gas domestik (IGD) kepada perusahaan produsen pupuk dengan harga gas US\$ 1,3/MMBTU, di mana selisih harga gas antara yang dipasok ke produsen pupuk dengan harga gas di pasaran ditanggung pemerintah. Sumber biaya untuk subsidi ini berasal dari APBN dan dana talangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas. PNBP Migas berasal dari bagi hasil migas antara pemerintah dengan perusahaan kontraktor migas yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas di dalam negeri.
3. Periode 2003-2005: Sistem subsidi yang berlaku merupakan kombinasi antara subsidi gas dan subsidi harga. Subsidi gas untuk pupuk urea, sedangkan subsidi harga untuk pupuk non-urea. Subsidi gas untuk pupuk urea dipilih dengan pertimbangan bahwa untuk memproduksi urea diperlukan amoniak yang merupakan hasil reaksi dari gas metana (CH₄) yang berasal dari gas bumi. Sasaran subsidi gas adalah perusahaan produsen pupuk. Pemerintah mematok harga gas yang disubsidi US\$ 1,0/MMBTU. Kalaupun ada selisih harga gas subsidi dengan harga pasar, maka selisihnya itu dibayar pemerintah. Sementara itu, subsidi harga pupuk non-urea memakai formula: penjumlahan Harga Pokok Produksi (HPP) dan biaya distribusi, dikurangi Harga Eceran Tertinggi (HET), kemudian dikalikan volume produksi. Jadi petani membeli pupuk non-urea dengan HET. Pemerintah mensubsidi selisih jumlah HPP dan biaya distribusi dengan HET

dikalikan volume produksi pupuk. Sumber subsidi gas dan subsidi harga untuk pupuk ini berasal dari APBN.

4. Periode 2006-sekarang: Sistem subsidi yang berlaku adalah subsidi harga. Sistem subsidi harga dihitung dengan formula: selisih antara HET dengan HPP dan biaya distribusi dikalikan volume produksi merupakan angka subsidi yang ditanggung pemerintah. Sumber subsidi adalah APBN.

Berdasarkan sistem dan mekanisme distribusinya, PATTIRO (2011) memaparkan sejarah program subsidi pupuk sebagai berikut:

1. Periode 1970-1978: Sistem rayonisasi antara importir dan produsen (BUMN & swasta). Satu provinsi/kabupaten dilayani oleh lebih dari satu importir/produsen. Pada masa ini importir sekaligus bertindak sebagai distributor.
2. Periode 1979-2001: Sistem distribusi tunggal oleh PT PUSRI (Pupuk Sriwijaya). PUSRI memiliki fasilitas distribusi seperti kapal, pengantongan, gerbong kereta api, dan gudang. Sebagai distributor tunggal, PUSRI juga dapat melakukan subsidi silang atau relokasi.
3. Periode 2002-sekarang: Sistem rayonisasi antarprodusen dalam negeri (BUMN). Tiap produsen bertanggung jawab atas wilayah rayonnya masing-masing. Produsen menunjuk distributor dan pengecer di wilayah tanggung jawabnya. Dengan sistem ini, produsen juga dapat melakukan relokasi (subsidi silang). Mulai 2009, diberlakukan sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), di mana rencana kebutuhan pupuk dari tiap-tiap wilayah dibuat terlebih dahulu agar memudahkan perkiraan kebutuhan volume pupuk serta dapat memperkirakan kebutuhan biaya. Dengan adanya RDKK, kasus penyimpangan distribusi pupuk dapat dicegah atau berkurang.

Penyebab terjadinya ketimpangan pelaksanaan kebijakan pupuk yang komprehensif tersebut karena dugaan adanya peningkatan ekspor pupuk ilegal baik melalui produsen pupuk itu sendiri maupun melalui penyelundup seiring peningkatan margin antara harga pupuk urea di pasar dunia dengan harga pupuk di pasar domestik. Kariyasa dan Yusdja (2005) menyatakan faktor lain yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi di pasar domestik adalah perembesan pupuk dari pasar bersubsidi ke pasar non bersubsidi. Perembesan ini terjadi terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan perkebunan besar. Sejak ditetapkan kebijakan harga pupuk, telah menyebabkan pasar pupuk domestik bersifat dualistik, yaitu pasar bersubsidi dan pasar non subsidi. Fenomena ini terjadi diduga akibat masih lemahnya penerapan sistem pengawasan pupuk yang telah dibentuk pemerintah. Langka pasok dan lonjak harga juga terjadi akibat perembesan pupuk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam pasar yang sama (pasar bersubsidi). Ada beberapa petani yang masih memiliki fanatisme terhadap pupuk merek tertentu, sehingga mereka mau membeli sekalipun dengan harga yang lebih mahal. Perilaku ini mengakibatkan terjadi kelangkaan pupuk pada daerah-daerah tertentu. Banyak produsen pupuk dan distributor yang ditunjuk tidak mempunyai gudang penyimpanan pupuk di lini III pada beberapa daerah diduga juga turut berkontribusi terhadap kelancaran pendistribusian pupuk yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan pupuk di tingkat pengecer atau petani.

Tabel 14 memperlihatkan, faktor yang memengaruhi kebijakan untuk subsidi pupuk yaitu luas lahan, kecocokan lahan, dosis pupuk organik, prospek usahatani, dan harga beli benih. Luas Lahan, petani dengan lahan yang luas, cenderung mengharapkan adanya kebijakan subsidi pupuk. Kecocokan lahan, petani yang mempunyai pemikiran bahwa "kecocokan lahan sebagai faktor penting" dan mendukung dalam bertanam padi, cenderung tidak mengharapkan adanya kebijakan subsidi pupuk dibandingkan dengan petani yang memandang bahwa "kecocokan lahan bukan faktor penting" dalam bertanam padi. Dosis, petani yang menggunakan dosis pupuk organik ≥ 1 ton/ha cenderung mengharapkan adanya kebijakan subsidi pupuk dibandingkan petani yang menggunakan dosis < 1 ton/ha. Prospek usahatani, usahatani yang berprospek jangka panjang cenderung membuat para petani mengharapkan adanya kebijakan subsidi pupuk dibandingkan dengan usahatani yang tidak berprospek jangka panjang. Harga beli benih murah, adanya harga beli pupuk yang murah cenderung membuat petani untuk tetap mengharapkan adanya subsidi pupuk dibandingkan jika harga pupuk mahal.

Tabel 14. Model Regresi Logistik Faktor-faktor yang Memengaruhi Kebijakan Subsidi Pupuk

No. Peubah Penjelas	Predictor (Peubah Penjelas)	Coef	SE Coef	Nilai Z	Peluang (P)	Odds Ratio
	Constant (Faktor koreksi)	189,095	14916,8	0,00	0,999	
x1	Jabatan	0,0754709	0,371770	0,20	0,839	1,08
x2	Keanggotaan	-202,892	14916,8	-0,00	0,999	0,00
x3	Kredit	0,402832	0,564636	0,71	0,476	1,50
x4	Kategori	0,308738	0,413623	0,75	0,455	1,36
x5	Luas Lahan	0,883529	0,350419	2,52	0,012	2,42
x6	Lahannya cocok	-123,513	0,418777	-2,95	0,003	0,29
x7	Iklimnya Cocok	-0,803186	0,577506	-1,39	0,164	0,45
x8	Dosis	110,942	0,657455	1,69	0,092	3,03
x9	Prospek	104,164	0,464224	2,24	0,025	2,83
x10	Harga benih	102,737	0,410975	2,50	0,012	2,79

3.4.3. Kebijakan Penyuluhan Pertanian

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yaitu menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam menghadapi persaingan global yang selama ini terabaikan. Dalam kaitan itu ada dua hal yang penting yang menyangkut kondisi sumberdaya manusia pertanian di daerah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu sumberdaya petugas dan sumberdaya petani. Kedua sumberdaya tersebut merupakan pelaku dan pelaksana yang mensukseskan program pembangunan pertanian.

Penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di era Bimas telah memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan produksi pertanian khususnya produksi padi, sehingga pada tahun 1984 pemerintah Republik Indonesia memperoleh penghargaan dari FAO sebagai Negara yang berhasil mencapai swasembada beras. Memasuki dasawarsa 1990-an semakin dirasakan menurunnya peran penyuluhan pertanian di Indonesia yang dikelola Departemen Pertanian. Hal ini terjadi karena selain terjadi perubahan struktur organisasi penyuluhan, juga semakin banyak pihak-pihak yang melakukan penyuluhan pertanian (perguruan tinggi, swasta, LSM dll) serta semakin beragamnya sumber-sumber informasi/inovasi yang mudah diakses oleh petani.

Tabel 18 memperlihatkan bahwa faktor yang memengaruhi kebijakan penyuluhan pertanian yaitu adanya pengetahuan petani, dan prospek usahatani. Petani yang memiliki pengetahuan yang baik untuk bertanam padi cenderung mengharapkan adanya kebijakan penyuluhan pertanian dibandingkan dengan petani yang pengetahuan bertaninya kurang. Prospek usahatani, usahatani yang "berprospek jangka panjang" cenderung membuat para petani tidak mengharapkan adanya kebijakan penyuluhan pertanian dibandingkan dengan usahatani yang "tidak berprospek jangka panjang".

Tabel 18. Model Regresi Logistik Faktor-faktor yang Memengaruhi Kebijakan Penyuluhan Pertanian

No. Peubah Penjelas	Predictor (Peubah Penjelas)	Coef	SE Coef	Nilai Z	Peluang (P)	Odds Ratio
	Constant (Faktor koreksi)	-191,651	10753,8	-0,00	0,999	
x1	Jabatan	-0,192805	0,330304	-0,58	0,559	0,82
x2	Keanggotaan	-0,880282	108,643	-0,81	0,418	0,41
x3	Kredit	-0,243265	0,463728	-0,52	0,600	0,78
x4	Pengetahuan	226,558	0,545869	4,15	0,000	9,64
x5	Kategori	0,534798	0,340779	1,57	0,117	1,71
x6	Luas Lahan	-0,0729739	0,134675	-0,54	0,588	0,93
x7	Lahannya cocok	0,386148	0,405806	0,95	0,341	1,47

x8	Iklimya cocok	-0,652779	0,627354	-1,04	0,298	0,52
x9	Prospek	-118,348	0,429616	-2,75	0,006	0,31
x10	Informasi	204,268	10753,8	0,00	0,998	7.43E+13
x11	Pembinaan	-0,325243	0,816333	-0,40	0,690	0,72

3.5. PENUTUP

Pada bagian penutup, akan dijabarkan berdasarkan kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan yang akan disarankan.

Kesimpulan:

- Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Selain faktor turunan/tradisi, alasan/motivasi utama petani memilih usahatani padi adalah karena faktor harga, dan sebagian besar petani belum merasakan manfaat kredit atau bantuan dari lembaga keuangan.
 2. Jenis varietas yang umum digunakan di Jawa Barat adalah Ciherang. Sebagiaian besar petani mendapatkan sumber benih padi berasal dari kelompok tani dan sumber informasi pengetahuan budidaya padi sebagian besar berasal dari Penyuluh Pertanian.
 3. Petani yang konsisten tanam padi dalam menentukan pemilihan pupuk mempertimbangkan jenis lahan dan dosis yang digunakan. Sedangkan petani yang berganti-ganti komoditas menjawab faktor yang menentukan dalam pemilihan pupuk adalah dosis yang digunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku petani yang berganti-ganti komoditas lebih kepada peningkatan produksi yang sebesar-besarnya. Kecenderungan petani ke depan lebih banyak menggunakan pupuk organik dari pada penggunaan pupuk anorganik.
 4. Alasan yang paling dianggap penting oleh petani dalam pemilihan pestisida adalah karena tingkat populasi hama dan jenis penyakit. Analisis trend penggunaan pupuk organik dan anorganik serta pengendalian hama penyakit tanaman menunjukkan bahwa perilaku petani sudah sesuai dengan kaidah lingkungan, dimana penggunaan dosis yang lebih besar kecenderungannya semakin menurun.
 5. Petani yang memiliki pengetahuan yang baik untuk bertanam padi cenderung mengharapkan adanya kebijakan penyuluhan pertanian dibandingkan dengan petani yang pengetahuan bertaninya kurang. Usahatani yang “berprospek jangka panjang” cenderung membuat para petani tidak mengharapkan adanya kebijakan penyuluhan pertanian dibandingkan dengan usahatani yang “tidak berprospek jangka panjang”.

Rekomendasi kebijakan yang disarankan :

1. Pemerintah perlu menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tepat sehingga merangsang petani untuk memproduksi padi.
2. Selain memberikan kebijakan subsidi pupuk dan benih, untuk peningkatan produktivitas usahatani, pemerintah juga perlu memberikan subsidi untuk membiayai infrastruktur, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lahan, maka usaha untuk meningkatkan produksi dan menjaga keberlanjutan peningkatan produksi akan lebih berhasil, serta mencegah konversi lahan sawah subur yang beririgasi teknis.
3. Pemerintah perlu merevitalisasi peran kelompok tani dan tenaga penyuluh dilapangan, terlebih pada distribusi pupuk dan benih yang bersifat tertutup. Selain itu juga pemerintah perlu mengawasi pendistribusian benih dan pupuk agar tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat harga. Perlu penyediaan dan pengawasan terhadap ketersediaan benih dan pupuk organik serta kemungkinan dari kondisi palsu.
4. Perlu adanya dukungan berupa pemberian penyuluhan dan pendampingan kepada petani dalam memberikan pengetahuan budidaya padi yang benar agar mengurangi penggunaan pupuk anorganik, serta lebih menggiatkan penggunaan terhadap pupuk organik.
5. Pemerintah perlu merangkul lembaga keuangan atau perbankan untuk membantu memberikan investasi dana dalam usahatani padi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre A. 2004. Analisis Perilaku Petani dalam Proses Keputusan Pembelian Pestisida di Daerah Karawang Jawa Barat. [Tesis]. Bogor (ID): Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor IPB.
- Azwar S. 2000. *Sikap Manusia Teori Skala dan Pengukurannya*. Edisi 2. Jakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. *Katalog BPS*: 9199017 Edisi 36 Mei 2013. Jakarta (ID).
- [BPTP] Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. 2011. Edisi Khusus Penas XIII. hal 14.
- Bandura, A. 1977. *Social Learning Theory*. New Jersey: Prentice - Hall.
- Beins BC, and Mc. Charty MA. 2012. *Research Methods and Statistics*. United States of America (US): Pearson.
- Budijanto, S., Sitanggang, A.B. 2011. Produktivitas dan Proses Penggilingan Padi Terkait dengan Pengendalian Faktor Mutu Berasnya. *Pangan*. Vol. 20, No.2, Juni 2011 : 141-152.
- Chernoff H. 1973. The Use of Faces to Represent Points in k- Dimensional Space Graphically. *Journal of The American Statistical Association*, (68). hlm 361–68.
- Dinas Pertanian Tasikmalaya. 2012. Laporan Tahunan Kabupaten Tasikmalaya. Desember 2012 dan Desember 2013.
- Dahuri. 1998. Konsep Pembangunan Berkelanjutan. *Enviromentally Sustainable Development Triangle-World Bank*, Serageldin and Steer, 1994.
- Kariyasa K. dan Y. Yusdja, 2005. Evaluasi Kebijakan Sistem Distribusi Pupuk Urea Di Indonesia : Kasus Provinsi Jawa Barat . *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 3 (3) : 201-216
- Kusnadi, Nunung. (2005). Perilaku Ekonomi Rumah tangga Dalam Pasar Persaingan Tidak Sempurna di Beberapa Provinsi di Indonesia.[Disertasi Doktor]. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. (unpublished).
- Mukhtar, Kaharuddin. 2012. Analisis Perbandingan Produksi dan Pendapatan Petani Padi Pengguna Paket Teknologi Pupuk Berimbang dan Pupuk Tidak Berimbang di Kabupaten Takalar. *Jurnal Agrisistem*, 8 (1). hlm 1-11.
- Nuhing I A. 2003. *Membangun Pertanian Masa Depan, Suatu Gagasan Pembaharuan*. Semarang (ID): Aneka Ilmu.
- PATTIRO (2011). Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia. Jakarta
- Sawit, Husein. 2012. Program RASKIN: Keserasian antara Produksi, Pengadaan Dalam Negeri dan Dukungan Politik. *Pangan*. Vol. 21, No.1, Maret 2012 : 71-84.
- Schmitz A, Furtan. 2009. Agricultural Policy: High Commodity and Input Prices. *Agricultural and Resource Economics Review*, 38/1, April 2009. hlm 18–35.
- Sembiring. 2001. Komoditas Unggulan Pertanian Propinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara: Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi.
- Setyawati. 2012. Dinamika Produksi Padi di Jawa Timur versus Target Surplus 10 juta Ton Beras Nasional 2014. *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kedaulatan Pangan dan Energi*. Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Juni 2012.

Sinukaban N dan J Sihite. 1993. Usahatani Konservasi dalam Pembangunan Pertanian yang Berkesinambungan. *Makalah disampaikan pada Kongres II dan Seminar Nasional Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI)*. Yogyakarta. 27- 28 Oktober 1993.

Sinukaban N. 1997. Sistem Pertanian Konservasi Kunci Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Forum Komunikasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah Indonesia*, di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 6 Oktober 1997.

Thurstone LL. 1927. *A Law of Comparative Judgment* dalam Maranell, GM. 1974. *Scaling: A Sourcebook for Behavioral Scientist*. Chicago (US): Aldine Publising Company.

LAMPIRAN 1

Tabel Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Padi Nasional

Tahun	Luas Panen	Pertumbuhan luas panen (%)	Produktivitas	Pertumbuhan produktivitas (%)	Produksi	Pertumbuhan produksi(%)
	(Ha)		(Ku/Ha)		(Ton)	
1993	10.993.920		43,78		48.129.321	
1994	10.717.734	-2,51	43,48	-0,69	46.598.380	-3,18
1995	11.420.680	6,56	43,52	0,09	49.697.444	6,65
1996	11.550.045	1,13	44,20	1,56	51.048.899	2,72
1997	11.126.396	-3,67	44,34	0,32	49.339.086	-3,35
1998	11.730.325	5,43	41,97	-5,35	49.236.692	-0,21
1999	11.963.204	1,99	42,52	1,31	50.866.387	3,31
2000	11.793.475	-1,42	44,01	3,50	51.898.852	2,03
2001	11.499.997	-2,49	43,88	-0,30	50.460.782	-2,77
2002	11.521.166	0,18	44,69	1,85	51.489.694	2,04
2003	11.488.034	-0,29	45,38	1,54	52.137.604	1,26
2004	11.922.974	3,79	45,36	-0,04	54.088.468	3,74
2005	11.839.060	-0,70	45,74	0,84	54.151.097	0,12
2006	11.786.430	-0,44	46,20	1,01	54.454.937	0,56
2007	12.147.637	3,06	47,05	1,84	57.157.435	4,96
2008	12.327.425	1,48	48,94	4,02	60.325.925	5,54
2009	12.883.576	4,51	49,99	2,15	64.398.890	6,75
2010	13.253.450	2,87	50,15	0,32	66.469.394	3,22
2011	13.203.643	-0,38	49,80	-0,70	65.756.904	-1,07
2012	13.445.524	1,83	51,36	3,13	69.056.126	5,02
2013	13.835.252	2,90	51,52	0,31	71.279.709	3,22
Rata-rata (1993-2002)	11.431.694		44		49.876.554	
Stdev (1993-2002)	383.544,79		0,83		1.630.167,61	
CV (1993-2002)	3,36		1,90		3,27	
Rata-rata (2003-2013)	12.557.545,91		48,32		60.843.317,18	
Stdev (2003-2013)	794.192,51		2,42		6.824.036,49	
CV (2003-2013)	6,32		5,00		11,22	

Lampiran 2.

Tabel Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Padi di Jawa Barat

Tahun	Luas Panen (Ha)	Pertumbuhan luas panen (%)	Produktivitas (Ku/Ha)	Pertumbuhan produktivitas (%)	Produksi (Ton)	Pertumbuhan luas panen (%)
1993	2,152,592		50.27		10,820,862	
1994	1,960,210	(8.94)	50.30	0.06	9,860,375	(8.88)
1995	2,125,666	8.44	50.44	0.28	10,722,717	8.75
1996	2,118,956	(0.32)	50.72	0.56	10,747,659	0.23
1997	2,040,680	(3.69)	50.73	0.02	10,352,650	(3.68)
1998	2,179,976	6.83	44.93	(11.43)	9,795,638	(5.38)
1999	2,181,205	0.06	45.81	1.96	9,993,014	2.01
2000	2,188,479	0.33	49.12	7.23	10,749,868	7.57
2001	1,866,069	(14.73)	49.5	0.77	9,237,593	(14.07)
2002	1,792,320	(3.95)	51.15	3.33	9,166,872	(0.77)
2003	1,664,386	(7.14)	52.73	3.09	8,776,889	(4.25)
2004	1,880,142	12.96	51.07	(3.15)	9,602,302	9.40
2005	1,894,796	0.78	51.65	1.14	9,787,217	1.93
2006	1,798,260	(5.09)	52.38	1.41	9,418,572	(3.77)
2007	1,829,085	1.71	54.2	3.47	9,914,019	5.26
2008	1,803,628	(1.39)	56.06	3.43	10,111,069	1.99
2009	1,950,203	8.13	58.06	3.57	11,322,681	11.98
2010	2,037,657	4.48	57.6	(0.79)	11,737,070	3.66
2011	1,964,466	(3.59)	59.22	2.81	11,633,891	(0.88)
2012	1,918,799	(2.32)	58.74	(0.81)	11,271,861	(3.11)
2013	2,029,891	5.79	59.53	1.34	12,083,162	7.20
Rata-rata (1993-2002)	2,061,669		49.05		10,095,751	
Stdev (1993-2002)	152,593.00		2.38	5.32	655,941.05	
CV (1993-2002)	7.40		4.85		6.50	
Rata-rata (2003-2013)	1,888,301		55.57		10,514,430	
Stdev (2003-2013)	110430.14		3.25		1119816.78	
CV (2003-2013)	5.85		5.84		10.65	

Sumber : BPS 2014 (diolah)